

TESIS

**KONSTITUSIONALITAS PERATURAN
DAERAH BERMUATAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DALAM PERSPEKTIF
OTONOMI DAERAH**



**Oleh
MAHMOERI ZULMANA
NIM. 2220215310029**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**KONSTITUSIONALITAS PERATURAN DAERAH
BERMUATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

MAHMOERI ZULMANA

NIM. 2220215310029

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : Konstitusionalitas Peraturan Daerah Bermuatan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah
Nama : Mahmoeri Zulmana
NIM : 2220215310029

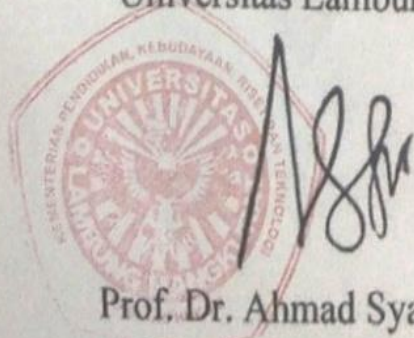
Disetujui,
PEMBIMBING



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 19750615 200312 1001

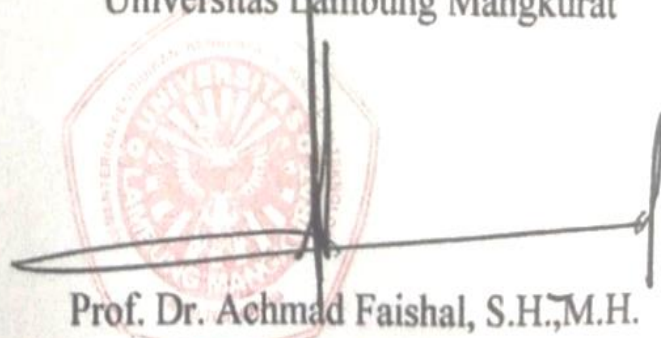
Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

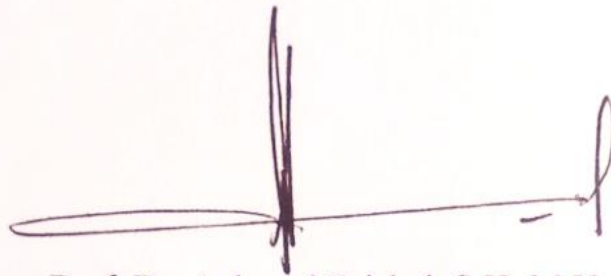
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 19750615 200312 1001

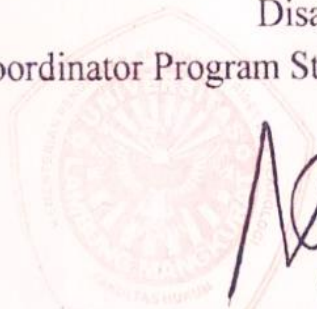

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal.....

Pembimbing



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 19750615 200312 1001

Disahkan oleh
Koordinator Program Studi Program Magister Hukum



Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung MAnkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 19750615 200312 1001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahmoeri Zulmana
NIM : 2220215310029
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Mahmoeri Zulmana
NIM. 2220215310029

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 16 Juni 2024

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Safrudin, S.H. LL.M

Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

MAHMOERI, ZULMANA. 2024. KONSTITUSIONALITAS PERATURAN DAERAH BERMUATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.. 145 halaman.

RINGKASAN

Pada Tahun 2022 Pasca Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi, Pemerintah Daerah dikejutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Undang-Undang tersebut mencabut beberapa-beberapa Undang-Undang serta mencabut beberapa Pasal pada Undang-Undang terkait Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku selama 2 (dua) tahun semenjak Peraturan tersebut di tetapkan. Sampai dengan dekarang belum ada satu pun Peraturan Daerah yang terbit dengan batas waktu 2 (dua) tahun Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang harus berkembang dan meningkat sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional. Dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari rakyat. Hal tersebut dimaksudkan agar Daerah tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, walaupun itu dipergunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang terkait dengan Peraturan Daerah bermateri Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah beberapa kali di uji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini semenjak di undangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan dicabutnya Undang-Undang tersebut pada awal tahun 2024, sebagaimana ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku sampai dengan 2 (dua) Tahun dari diundangkannya tersebut, tercatat 4 (empat) kali Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di ajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan sebagai bentuk implementasi tanggung jawab pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, pengawasan sebagai bentuk harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pengawasan untuk mengukur konsistensi dan evaluasi kebijakan otonomi daerah, adapun kelemahan yang ada yaitu kurang inovasi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan pertimbangan luasnya cakupan geografis Indonesia, implementasi pembinaan dan pengawasan berjenjang, implementasi otonomi luas dan bertanggungjawab, fungsi koordinatif, sedangkan kelemahannya yaitu konflik kepentingan gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pengawasan peraturan daerah dengan materi muatan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui *executive review* (fasilitasi, dan evaluasi), *legislative review/political review* oleh DPRD dengan menggunakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, pengujian peraturan daerah dengan materi muatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan *judicial review*.

Peraturan Daerah sebelum diundangkan oleh Pemerintah Daerah sudah sepatutnya melalui Evaluasi dari Instansi Vertikal dalam hal ini ada 3 (tiga) kementerian yang mengevaluasi Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi/kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan, dilakukan untuk menguji kesesuaian kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan kebijakan fiskal nasional dan Sesuai Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Terkait dengan Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan PDRD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD dapat dimuat dalam Perda PDRD serta ketentuan lebih lanjut terkait ketentuan dan tata cara pemungutan PDRD dapat diatur dalam Perkada.

ZULMANA, MAHMOERI. 2024. KONSTITUSIONALITAS PERATURAN DAERAH BERMUATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.. 145 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: peraturan daerah, kewenangan, otonomi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, konstitusionalitas

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Konstitusionalitas Peraturan Daerah Bermuatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah adalah untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan pemerintahan daerah membentuk peraturan daerah bermuatan pajak dan retribusi dalam hubungannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah dengan evaluasi, penjelasan pedoman, meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian konstitusionalitas peraturan daerah dengan materi bermuatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan daerah dapat membentuk peraturan daerah dengan materi muatan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan penugasan oleh pemerintah pusat melalui tugas pembantuan, kekhususan daerah dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah. pengujian konstitusionalitas peraturan daerah dengan materi muatan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan presiden sebagai pemegang kekuasaan negara dan kewenangan konstitusional pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memberikan jaminan perlindungan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan otonomi.

ZULMANA, MAHMOERI. 2024. *THE CONSTITUTIONALITY OF REGIONAL REGULATIONS CONTAINS REGIONAL TAXES AND REGIONAL LEVIES IN THE PERSPECTIVE OF REGIONAL AUTONOMY*. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 145 Pages.

ABSTRACT

Keywords: regional regulations, authority, regional autonomy, regional taxes and levies, constitutionality.

The purpose of the thesis research on The Constitutionality of Regional Regulations Containing Regional Taxes and Regional Levies in The Perspective of Regional Autonomy is to understand and analyze the authority of local governments in forming regulations related to taxes and levies in the context of regional autonomy, with evaluation, guideline explanations, and improvements in understanding and uniformity.

The research method used in the study of the constitutionality of regional regulations containing regional taxes and regional levies is normative legal research, using legislative and conceptual approaches.

The thesis research results indicate that local government can formulate regional regulations concerning regional taxes and regional levies based on assignments from the central government through delegated tasks, as well as specific regional matters related to local taxes and fees, constitutional testing of these regulations, which pertain to local taxes and fees, is carried out by the President as the holder of state power, and it is within the constitutional authority of local government to establish regulations that do not conflict with higher legislation, public interest, morality, public order, and provide guarantees of protection, certainty, justice, and utility in line with the purpose of autonomy.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas anugerah rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “ KONSTITUSIONALITAS PERATURAN DAERAH BERMUATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH.” pada Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis (Alm) Bapak H. M.Kesuma dan Ibu Hj. Agustina yang selalu mendo'akan penulis, kepada Istri penulis, Annisa Rezki Huda., dan anak-anak penulis, Yumna Alisha Moeann dan Firdhan Baswara Moeann, kakak penulis, mertua penulis, Bapak Husaini dan Ibu Roslinda Anita. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku Pembimbing penulis , yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan serta masukan dan saran dengan humanis kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Tim pengujian pada sidang Tesis penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Ketua , Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H dan Bapak. Dr. Safrudin, S.H. LL.M selaku anggota, yang telah memberikan kritik dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan Tesis penulis.
4. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mentransfer keilmuannya kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Kepala Bagian dan rekan-rekan kerja di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.

6. Rekan-rekan seperjuangan pada Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2022 terutama rekan-rekan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak/Ibu menjadi ladang ibadah, amal sholeh dan mendapatkan balasan disisi Allah SWT, amin.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, karena kesempurnaan hanya kepunyaan dzat yang maha sempurna yaitu Allah SWT. Dengan semangat kebaikan, penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisan Tesis ini. Harapan penulis semoga dengan segala kekurangan penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 16 Juni 2024



Mahmoeri Zulmana
NIM. 2220215310029

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Metode Penelitian.....	33
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	42
BAB II PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS DARI SEGI EVALUASI DAN MATERI PERATURAN DAERAH BERMUATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH	
A. Kewenangan Pemerintahan Daerah Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah	47
B. Pembentukan Peraturan Daerah Bermateri Muatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah	69
BAB III ANALISA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERMUATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI	

DAERAH SERTA BAGAIMANA DAERAH MENYIKAPI
PERATURAN DAERAH YANG BELUM DITETAPKAN

A. Analisa Pembentukan Peraturan Daerah Bermuatan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..... 110

B. Daerah Menyikapi Peraturan Daerah Yang Belum

Ditetapkan 134

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 142

B. Saran 143

DAFTAR PUSTAKA

